

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. 2014. *Bunga Rampai Administrasi Publik*. Jakarta: DJP.
- T. Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Sonny. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Herlina, Rahman. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta : Gedung Radius Prawiro.
- Lestari, Voni. 2014. *Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Mujiyati dan M. Abdul Aris. 2014. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mujiyati, Lina A. Safitri, dan Della K. Putri. 2014. *Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pasca UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo)*. ISSN 2460-0784.
- Munir, D., Henry A. D., dan Hessel N. S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.

- Nurmalasari, Rany. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Mataram)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor: 56 Tahun 2011, *Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sragen*.
- Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2008, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen*.
- Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2011, *Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen*.
- Peraturan Daerah Nomor: 16 tahun 2011, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010, *Tentang Penyusunan Rencana dan Strategi Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016*.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, *Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja*.
- Pradita, Ferian D., Imam Suyadi, dan M. Faisal Riza. 2014. *Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Prawoto, Agus. 2011. *Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Edisi 1. Yogyakarta: BPF.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputro, Rudi, Nengah Sudjana, dan Devi F. Azizah. 2014. *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Malang : Universitas Brawijaya.

Siahaan, P. Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1994, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2000, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.